

- b. Kebijakan criminal secara non penal (diluar pengadilan), dilakukan sebelum perbuatan itu dilakukan yang bersifat mencegah (*preventif*) bertujuan untuk mengurangi jumlah tindak pidana

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Bunga Rampai.
- Assiddiqie, Jimly. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi Cetakan ke2*. Jakarta: BIP.
- C.ST. Kansil.1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cetakan ketujuh*. Jakarta: Balai Pustaka.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum di Indonesia dan Penerapan*. Jakarta: -
- Hamdan, Muhammad. 1997. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat.2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Lamintang, P.A.F.1988. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amico.
- _____. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar.
- Merpaung, Laden.2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rieneke Cipta.
- Moh. Mahfud MD. 2012. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: -

Saleh, Roeslan. 1982. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Soekanto, Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soemitro, Roni Hanitijo, 1982. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Diponegoro.

Suseno, Sigit. 2012. *Yuridiksi Tindak Pidana Cyber*. Bandung: Refika Aditama

Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan PerUndang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1947 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di perbaharui UU Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Undang-Undang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.

Jurnal

Turban. “*Kompilasi Hukum Telematika.*” *Jurnal ITE* (April 2010).

Website

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>, diakses

30 Oktober 2017

<http://id.wikipedia.org/teknologi>, diakses 30 Oktober 2017

